

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Desember 2007, Vol.4, No. 2, hal. 211-228

**ANALISIS PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN BELANJA
PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI,
KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN:
PENDEKATAN ANALISIS JALUR**

Anis Setiyawati

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo
trunojoyo1@hotmail.com

Ardi Hamzah

Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo
hamzahardi@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to examine directly the effect of region original revenue, general fund allocation, specific fund allocation, and capital expenditure on economic growth; to examine directly the effect of economic growth on poverty and unemployment; and to examine indirectly the effect of region original revenue, general fund allocation, specific fund allocation, and capital expenditure on poverty and unemployment. The samples of study are region expense and revenue budget in 2001 – 2005 at 38 municipal. The result of study with regression was indicated that region original revenue and general fund allocation have directly significant effect at level 0,01 on the economic growth, economic growth have directly significant effect at level 0.01 on the poverty, and the unemployment, the region original revenue and general fund allocation have indirectly significant effect on the poverty and the unemployment.

Keywords: *region original revenue, general fund allocation, specific fund allocation, development expense, economic growth, poverty, unemployment*

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001. Kebijakan ini dipandang sangat demokratis karena sistem Pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Mudrajad 2004). Terjadinya pembangunan di suatu negara atau daerah ditandai dengan beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan.

Menurut (Mudrajad 2004) ada tiga masalah pokok yang harus diperhatikan dalam mengukur pembangunan suatu negara atau daerah, yaitu 1) Apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan, 2) Apa yang terjadi terhadap pengangguran, dan 3) Apa yang terjadi terhadap ketimpangan dalam berbagai bidang. Ketiga masalah pokok tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Tingginya tingkat kemiskinan dikarenakan banyaknya pengangguran yang kemudian berdampak pada ketimpangan dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, bila salah satu dari tiga hal tersebut mengalami gangguan atau goncangan, maka dua hal yang lainnya juga mengalami dampaknya.

Selain itu, timbulnya kemiskinan juga dikarenakan oleh rendahnya kemampuan masyarakat mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Kondisi ini diperburuk oleh banyaknya tenaga kerja yang di-PHK akibat para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri gulung tikar dan melarikan modalnya ke luar negeri. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk memikirkan berbagai tindakan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta pengangguran. Dalam hal ini, pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Pendapatan daerah tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan belanja daerah mencakup belanja pembangunan.

Perbedaan PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya akan berdampak pada pertumbuhan

ekonomi yang berbeda pula, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya. Untuk itu, penelitian ini mengkaji dan menguji pengaruh PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pengangguran dengan menggunakan pendekatan analisis jalur. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh langsung PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran, serta pengaruh tidak langsung PAD, DAU, DAK, dan belanja pembangunan terhadap kemiskinan dan pengangguran.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

PAD, DAU, DAK dan Belanja Investasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2001) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bratakusumah & Solihin (2002) pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan – kegiatan daerah tersebut. Dalam kenyataannya PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Selanjutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan bantuan berupa DAU yang besarnya sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Untuk daerah provinsi menerima sebesar 10% dari DAU yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kota sebesar 90%. Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 yang menyatakan bahwa pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang

berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Menurut Hairul Aswadi dalam Halim (2001) tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hal ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah.

Terkait dengan belanja daerah, dibagi ke dalam dua kelompok yaitu (Halim, 2002) belanja rutin/operasional dan belanja pembangunan. Belanja pembangunan terdiri dari belanja publik dan belanja aparatur. Untuk belanja pembangunan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah berupa aspek kelayakan teknis, keuangan, ekonomi, dan sosial budaya.

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dan perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross domestic product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad 1999). Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan peningkatan standar hidup dan penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.

Menurut Kuznet dalam Jhingan (2000), terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada produk nasional dan komponennya, yaitu: (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita; (2) Peningkatan produktivitas; (3) Laju perubahan struktural yang tinggi; (4) Urbanisasi; (5) Ekspansi negara maju; serta (6) Arus barang, modal dan orang antar bangsa. Keenam ciri pertumbuhan ekonomi tersebut saling berkaitan satu sama lain, yang terjalin dalam urutan sebab akibat. Menurut pandangan ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jhon Stuart Mill) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (1988), yaitu: 1. Jumlah penduduk; 2. Jumlah stok barang-barang modal; 3. Luas tanah dan kekayaan alam; serta 4. Tingkat teknologi yang digunakan.

Menurut Dinas Sosial Jawa Timur, definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi, kemiskinan menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar, sedangkan dari sisi sosial menunjukkan ketidakmampuan dalam peran sosial. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, baik yang relatif tetap maupun yang berkembang. Faktor yang relatif tetap misalnya letak geografis dan daya dukung alam. Sementara faktor yang berkembang adalah berupa keadaan sosial, keadaan budaya yang menyangkut pengetahuan dan keterampilan, adat-istiadat, situasi politik dan kebijaksanaan penguasa. Menurut pakar ekonomi ada beberapa indikator yang menyebabkan orang terperangkap kemiskinan (Todaro 1995). Indikator tersebut diantaranya terkait dengan perkembangan di bidang sosial dan bidang ekonomi, yaitu antara lain pelayanan kesehatan, gizi, pengajaran, perumahan, konsumsi, transportasi dan jasa, pertanian, industri, dan perdagangan.

Pengertian pengangguran menurut Iskandar Putong (2003) adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (*future starts*). Samuelson (1997) membagi penyebab dari pengangguran dalam 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) Pengangguran friksional; (2) Pengangguran struktural; dan (3) Pengangguran siklis. Berdasarkan prakteknya, menurut Kuncoro (2003) pengangguran digolongkan menjadi penganggur penuh, setengah penganggur, dan kadang penganggur.

Hubungan PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran.

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Jika ternyata PAD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, maka terdapat kemungkinan kuat bahwa DAU dan DAK juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD.

Salah satu persoalan pembangunan dasawarsa ini adalah usaha untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Karena selain alasan kemanusiaan, mengatasi

masalah kemiskinan merupakan usaha untuk menghindari biaya pembangunan yang lebih besar di masa yang akan datang. Sudah banyak teori, model dan strategi pembangunan yang diutarakan para ahli untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun hingga saat ini masalah kemiskinan tetap menjadi masalah penting di negara-negara berkembang. Di Indonesia, kebijakan mengatasi permasalahan kemiskinan juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi fenomena yang terjadi justru menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin tidak berkurang. Ini membuktikan bahwa dalam pengelolaan pendapatan masih terjadi kesenjangan pengalokasian sektor-sektor yang memberikan kontribusi pada pembangunan sehingga hasil pembangunan yang dilakukan selama ini belum memberikan kemakmuran yang merata. Jika setiap daerah mampu mengoptimalkan dan mengelola pendapatannya sendiri, maka akan terjadi peningkatan pada berbagai potensi di sektor masing-masing yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu daerah tersebut akan menekan tingkat pengangguran di daerahnya dan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di daerah.

Untuk mengoptimalkan dan mengelola PAD yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berimbas pada penekanan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan, maka diperlukan pengelolaan alokasi anggaran sebagai salah satu strategi pengelolaan pendapatan. Strategi alokasi anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan / ketimpangan regional (Kuncoro, 2003). Pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan belanja pembangunan. Dengan demikian, strategi pengoptimalan dan pengelolaan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor-sektor pembangunan. Pertumbuhan ekonomi akan menekan tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Chang & Ho dalam Abdu Rahman (2002) menyatakan bahwa PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan melihat hasil analisis elastisitas PAD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Lin dan Liu dalam Priyo (2006) menyatakan bahwa belanja pembangunan merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan yang kuat antara belanja pembangunan dengan tingkat desentralisasi yang mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Penelitian Adi (2006) mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan

PAD se Jawa Bali, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Namun sayangnya pertumbuhan ekonomi Pemda kabupaten dan kota masih kecil, sehingga penerimaan PADnya pun kecil. Sedangkan belanja pembangunan memberikan dampak yang positif terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Arthur Okun dalam Iskandar Putong (2003) mengatakan apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% di atas trennya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Dengan kata lain, jika tingkat pengangguran ingin diturunkan sebesar 20%, maka pertumbuhan ekonomi haruslah dipacu agar bisa tumbuh sebesar 5% di atas rata-rata.

Hipotesis Penelitian

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

- H_{A1}: PAD secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.**
- H_{A2}: DAU secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.**
- H_{A3}: DAK secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.**
- H_{A4}: Belanja Pembangunan secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.**
- H_{A5}: Pertumbuhan Ekonomi secara langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan.**
- H_{A6}: Pertumbuhan Ekonomi secara langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran.**
- H_{A7}: PAD secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan.**
- H_{A8}: PAD secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran.**
- H_{A9}: DAU secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan.**
- H_{A10}: DAU secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran.**
- H_{A11}: DAK secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan.**
- H_{A12}: DAK secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran.**

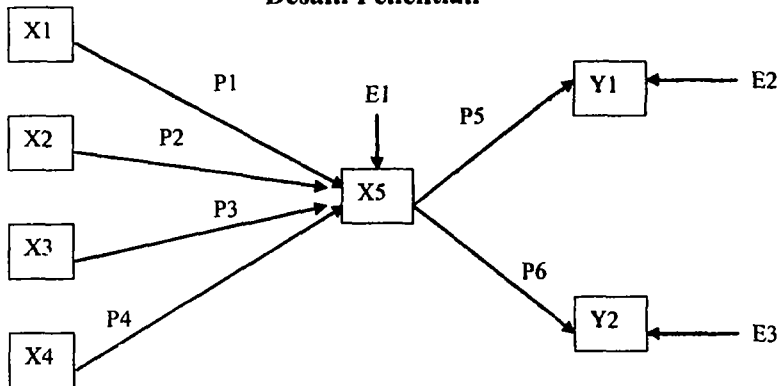
H_{A13} : Belanja pembangunan secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan.

H_{A14} : Belanja pembangunan secara tidak langsung berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran.

Desain Penelitian

Berdasarkan hipotesis penelitian, maka desain penelitian dapat digambarkan dan dibuatkan persamaan regresinya sebagai berikut:

Gambar 1
Desain Penelitian



Adapun persamaan regresi dari desain penelitian tersebut adalah sebagai berikut ini.

$$X_5 = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + \varepsilon_t$$

$$Y_1 = \alpha + \gamma X_5 + \varepsilon_t$$

$$Y_2 = \alpha + \delta X_5 + \varepsilon_t$$

Di mana:

α = konstanta

$\beta, \gamma,$ dan δ = koefisien

ε_t = error term

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X_3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

X_4 = Belanja Investasi

X_5 = Pertumbuhan Ekonomi

Y_1 = Kemiskinan

Y_2 = Pengangguran

Nilai PAD, DAU, DAK, dan belanja investasi satuannya adalah jutaan, sedangkan nilai pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran satuannya adalah persentase. Untuk menghindari bias, maka dilakukan standarisasi terhadap semua variabel-variabel tersebut sehingga nilainya tidak berbeda jauh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sebelum dilakukan pengujian regresi, maka dilakukan uji asumsi klasik pada desain penelitian tersebut berupa uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan otokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan variabel-variabel penelitian terbebas dari uji asumsi klasik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda untuk melakukan analisis jalur terhadap variabel-variabel penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan APBD Jawa Timur dan realisasinya untuk tahun 2001 sampai dengan 2005 setelah adanya implementasi Undang-undang Otonomi Daerah. Tahun yang sama juga berlaku bagi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Sampel dalam penelitian ini adalah 38 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota mulai tahun 2001 sampai tahun 2005 yang telah diadministrasikan dengan baik dan telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa data kuantitatif yang meliputi data keuangan realisasi APBD yakni data PAD, DAU, DAK, belanja pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dinas atau instansi yang terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik Jawa Timur serta secara *online* di situs-situs Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel eksogen dan endogen. PAD, DAU, DAK, dan belanja investasi merupakan variabel eksogen,

pertumbuhan ekonomi merupakan variabel endogen dan eksogen, kemiskinan dan pengangguran merupakan variabel endogen.

Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel penelitian, maka variabel – variabel tersebut didefinisikan secara operasional dan diukur sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD diukur dari total penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diukur dari jumlah penerimaan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. DAK diukur dari jumlah penerimaan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat.
4. Belanja pembangunan adalah pengeluaran ditujukan untuk kepentingan publik dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian daerah. Belanja pembangunan diukur dari jumlah alokasi belanja publik dan belanja aparatur.
5. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari selisih antara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada saat ini dengan PDRB sebelumnya dibagi dengan PDRB saat ini.
6. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Kemiskinan diukur dari persentase jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut.
7. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Pengangguran diukur dari persentase jumlah penduduk yang menganggur di daerah tersebut.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data pada penelitian ini menggunakan hasil statistik deskriptif dan analisis jalur dengan menggunakan regresi linier. Untuk hasil pengujian data dengan statistik deskriptif dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 1
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Deviasi Standar
Pendapatan Asli Daerah	190	5,152	496,190	33,332.67	53,450.774
Dana Alokasi Umum	190	80,774	513,563	248,841.21	89,955.922
Dana Alokasi Khusus	190	1,000	21,918	6772.22	2,872.791
Belanja Pembangunan	190	16,249	15,716,327	171,878.96	1,134,849.233
Laju Pertumbuhan Ekonomi	190	2.03	6.93	4.4073	1.269
Kemiskinan	190	12.68	630.46	194.3956	127.153
Pengangguran	190	1.05	14.53	5.7907	2.946
Valid N (<i>listwise</i>)	190				

Sumber: Data Sekunder Diolah (2007)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa kesenjangan PAD, DAU, dan DAK antara satu kabupaten/kota yang menerima PAD, DAU, dan DAK yang jumlahnya minimum dengan kabupaten/kota yang menerima PAD, DAU, dan DAK yang jumlahnya maksimum cukup besar. Hal ini didukung dengan nilai deviasi standar yang besar pada PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan. Bahkan kesenjangan belanja pembangunan antara kabupaten/kota yang jumlahnya minimum dengan kabupaten/kota yang jumlahnya maksimum terbilang besar. Hal ini juga didukung dengan nilai deviasi standar yang besar. Pada tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran juga mengalami kesenjangan yang cukup besar antara kabupaten/kota yang jumlahnya minimum dengan kabupaten/kota yang jumlahnya maksimum. Hal ini didukung dengan nilai deviasi standar yang cukup besar. Adanya kesenjangan pada PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan menyebabkan adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran.

Pada pengujian dengan analisis jalur akan dianalisis besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen seperti dalam regresi linier. Tetapi dalam analisis jalur juga memperhatikan besarnya pengaruh di antara variabel eksogen itu sendiri. Di dalam analisis jalur, di samping ada pengaruh langsung juga terdapat pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Berdasarkan rancangan penelitian tersebut, dilakukan pengujian untuk melihat pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil pengujian

pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Hasil Estimasi Regresi Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Prediksi Tanda	Koefisien	Standar Error	Beta	t-hitung	Sig.
Konstanta		-1.61×10^{-15}	0.069		0.000	1.000
PAD*	Positif	0.363	0.098	0.363	3.704	0.000
DAU**	Positif	-0.185	0.075	-0.185	-2.483	0.014
DAK	Positif	0.055	0.071	0.055	0.782	0.435
Belanja Pembangunan	Positif	-0.082	0.092	-0.082	-0.891	0.374
Koefisien Determinasi (R^2) =		0.084				

Sumber: Data Sekunder Diolah (2007)

*Sig. pada $\alpha = 0,01$

Variabel Dependen = Pertumbuhan Ekonomi

**Sig. pada $\alpha = 0,05$

Dengan mengacu pada tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sesuai dengan hipotesis H_{A1} . Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Chan dan Ho dalam Abdu Rahman (2002) dan Adi (2006). Semakin tinggi PAD, maka semakin meningkat laju pertumbuhan ekonominya. Ini dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah. DAU juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pengaruhnya adalah negatif. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis H_{A2} . Ini menunjukkan semakin besar DAU yang diperoleh, maka semakin menghambat atau mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan DAU yang diperoleh tidak keseluruhan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya sebagian kecil saja yang digunakan. Itu pun terkadang untuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang kurang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah malah mendapat alokasi DAU yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan perhitungan DAU berdasarkan celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan potensi fiskal pada daerah tersebut. Selain itu, DAU yang diperoleh tersebut sebagian digunakan untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau disimpan di bank daerah sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan stagnan bahkan menurun dengan adanya hal itu.

Untuk DAK dan belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis H_{A3} dan H_{A4} . Hasil

penelitian ini juga tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lin dan Liu dalam Priyo (2006) serta Adi (2006). Hal ini dikarenakan karakteristik DAK yang peruntukannya cukup spesifik. Untuk belanja pembangunan bisa dikarenakan adanya kebocoran maupun penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dapat ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3
Hasil Estimasi Regresi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Variabel	Koefisien	Standar Error	Beta	t-hitung	Sig.
Konstanta	-1.61×10^{-15}	0.070		0.000	1.000
PAD*	0.266	0.070	-0.266	-3.778	0.000
Koefisien Determinasi (R^2) =	0.066				

Sumber: Data Sekunder Diolah (2007)
Variabel Dependen = Kemiskinan

*Sig. pada $\sigma = 0,01$
**Sig. pada $\alpha = 0,05$

Berdasarkan pada tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Dalam hal ini pengaruh pertumbuhan ekonomi adalah negatif terhadap kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis H_{A5} . Semakin meningkat laju pertumbuhan ekonomi semakin berkurang jumlah pengangguran. Hal ini dikarenakan adanya optimalisasi sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti adanya peningkatan pada sektor perindustrian dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lain.

Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dapat ditunjukkan pada tabel 4. berikut ini

Tabel 4
Hasil Estimasi Regresi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran

Variabel	Prediksi Tanda	Koefisien	Standar Error	Beta	t-hitung	Sig.
Konstanta		-2.463×10^{-16}	0.064		0.000	1.000
PAD*		0.467	0.064	0.467	7.428	0.000
Koefisien Determinasi (R^2) =		0.214				

Sumber: Data Sekunder Diolah (2007)
Variabel Dependen = Pengangguran

*Sig. pada $\alpha = 0,01$
**Sig. pada $\alpha = 0,05$

Dengan mengacu pada tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengangguran. Penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis H_{A6} . Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthur Okun dalam Iskandar Putong (2003) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengurangi jumlah pengangguran. Ini menunjukkan semakin besar pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar jumlah pengangguran. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi hanya berdasarkan angka-angka makro saja, seperti tingkat inflasi yang terkendali, nilai tukar yang stabil, Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat dan lain-lain, sedangkan sektor riil khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kurang berkembang dan berdaya sehingga kurang atau tidak dapat menyerap jumlah pengangguran. Selain itu, fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor riil juga relatif kecil sehingga pertumbuhan sektor riil juga stagnan bahkan menurun. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak merata sehingga timbul kesenjangan sosial.

Terdapat dua indikator validitas model di dalam analisis jalur (*path analysis*) yaitu koefisien determinan total dan *theory trimming*. Koefisien determinan total adalah total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model yang diukur dengan:

$$R^2m = 1 - P^2E_1P^2E_2P^2E_3$$

$$R^2m = 1 - (0,957)^2 (0,966)^2 (0,966)^2$$

$$R^2m = 20,25 \text{ atau } 20,25\%$$

Di mana:

R^2m = total keragaman data

P^2E_1 = nilai kuadrat residu pada X_5

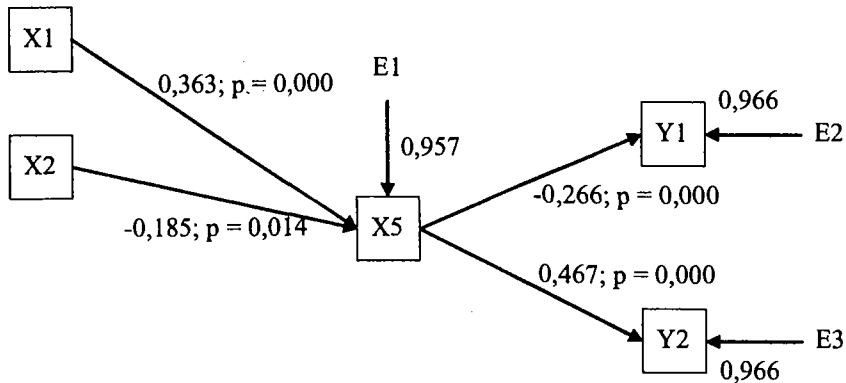
P^2E_2 = nilai kuadrat residu pada Y_1

P^2E_3 = nilai kuadrat residu pada Y_2

Besarnya R^2m sebesar 20,25% artinya keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 20,25% atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data, 20,25%nya dapat dijelaskan oleh model tersebut, sedangkan sisanya sebesar 79,75% dijelaskan oleh variabel lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian.

Berdasarkan teori *trimming*, jalur-jalur yang non signifikan dibuang sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empiris. Adapun model dalam bentuk diagram jalur berdasarkan teori *trimming* adalah sebagai berikut.

Gambar 2
Uji Validasi Koefisien Jalur



Model tersebut di atas menunjukkan pengaruh tidak langsung PAD (X_1) ke kemiskinan (Y_1) melalui pertumbuhan ekonomi (X_5) adalah sebesar $0,363 \times -0,266 = -0,0966$ atau sebesar 9,66%. Hasil ini sesuai dengan hipotesis H_{A7} . Ini menunjukkan bahwa PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada pengurangan kemiskinan. Pada pengaruh tidak langsung X_1 ke pengangguran (Y_2) melalui X_5 adalah sebesar $0,363 \times 0,467 = 0,1695$ atau 16,95%. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis H_{A8} . Ini menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran. Pengaruh tidak langsung DAU (X_2) ke Y_1 melalui X_5 adalah sebesar $-0,185 \times -0,266 = 0,049$ atau 4,9%. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis H_{A9} . Ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pada pengaruh tidak langsung X_2 ke Y_2 melalui X_5 adalah sebesar $-0,185 \times 0,467 = 0,086$ atau 8,6%. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis H_{A10} . Ini menunjukkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, selanjutnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesenjangan PAD, DAU, dan DAK antara satu kabupaten/kota yang menerima PAD, DAU, dan DAK yang jumlahnya minimum dengan kabupaten/kota yang

menerima PAD, DAU, dan DAK yang jumlahnya maksimum cukup besar. Bahkan kesenjangan belanja pembangunan antara kabupaten/kota yang jumlahnya minimum dengan kabupaten/kota yang jumlahnya maksimum terbilang besar. Pada tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran juga mengalami kesenjangan yang cukup besar antara kabupaten/kota yang jumlahnya minimum dengan kabupaten/kota yang jumlahnya maksimum untuk tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran.

Hasil pengujian secara langsung dengan regresi berganda menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hasil pengujian secara tidak langsung PAD terhadap kemiskinan adalah sebesar 9,66% dan pengangguran sebesar 16,95%, sedangkan DAU terhadap kemiskinan adalah sebesar 4,9% dan terhadap pengangguran sebesar 8,6%.

Keterbatasan

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya beberapa saja, masih ada variabel-variabel lain, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba kekayaan daerah, dana dekonsentrasi, dana perbantuan, belanja aparatur dan lain-lain yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran.

Saran-Saran

Bagi penelitian selanjutnya perlu menambah, mengurangi atau mengganti variabel-variabel tersebut dengan variabel-variabel lain yang dimungkinkan relevan dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy, Halim Abdul. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah." Dalam *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140-1159. 2003.
- Adi, Priyo Hari. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah." Dalam *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*. 2006.
- Arsyad, Licolin. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, edisi pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1999.

- Basry, Faisal. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit BPFE: 1988.
- Bratakusuma, Sholikin. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ghozali, Imam. *Statistik Multivariat SPSS*. Semarang: Penerbit BP Universitas Diponegoro, 2006.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2001.
- . *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002.
- Hamzah. "Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran." Dalam Simposium Akuntansi & Keuangan Sektor Publik Pertama Pasca Sarjana UPN Veteran, Surabaya, 2007.
- Indriantoro, Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*, edisi pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2002.
- Kantor Badan Pusat Statistik Jawa Timur. "Jawa Timur dalam Angka tahun 2001-2004."
- Jhingan, ML. *Ekonomi Perencanaan & Pembangunan*, edisi pertama. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 2000.
- Kantor Badan Pusat Statistik Jawa Timur. "Kabupaten dan Kota dalam Angka 2005"
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- . *Ekonomi Pembangunan*, edisi ketiga. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN. 2003.
- Kusnadi, Rahardjo, Zaedan, Sukmalana. *Ekonomi Mikro*. Malang: Penerbit Universitas Brawijaya, 1999.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2002.
- Nordhaus, Samuelson. *Mikro Ekonomi*, edisi keempat belas. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.
- PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- PP Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Putong, Iskandar. *Ekonomi Mikro & Makro*, edisi kedua. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.
- Samuelson. *Makro Ekonomi*. Diterjemahkan oleh Haris A, Munandar, Fredy Saragih, dan Rudi Tambunan. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1997.
- Saragih. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Sidik, Machfud, dan Robert Sir. anjutak. *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Kebijakanaksanaan*. Jakarta: Penerbit FE-UI dan Bina Grafika, 1991.
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Diterjemahkan oleh Haris A, Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1995.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.